

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Lokasi Penambangan Pasir di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri**

Kondisi Geografis Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, posisi geografi terletak antara  $111^{\circ} 47' 05''$  sampai dengan  $112^{\circ} 18' 20''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 36' 12''$  sampai dengan  $8^{\circ} 0' 32''$  Lintang Selatan. Wilayah Kecamatan Ngadiluwih, yakni :

- a. Sebelah Barat Kecamatan Mojo
- b. Sebelah Utara Kecamatan Keras
- c. Sebelah Timur Kecamatan Kandat
- d. Sebelah Selatan Kecamatan Manis Renggo

Kondisi topografi terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Suhu udara berkisar antara  $23^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $31^{\circ}\text{C}$  dengan tingkat curah hujan rata-rata sekitar 1652 mm per hari. secara keseluruhan luas wilayah ada sekitar  $41,85 \text{ Km}^2$  dan ditinjau dari jenis tanahnya, Kabupaten Kediri dapat dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

1. Regosol coklat kekelabuan seluas 77.397 Ha atau 55,84 %, merupakan jenis tanah yang sebagian besar ada di wilayah kecamatan Kepung, Puncu, Ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, kandang, kandat, Ringinrejo, Kras, papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang dan Gampengrejo

2. Aluvial kelabu coklat seluas 28,178 Ha atau 20,33 %, merupakan jenis tanah yang dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyak, Papar, Tarokan dan Kandangan
3. Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4.408 Ha atau 3,18 %, dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 dpl seperti Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen dan Mojo. Mediteran coklat merah, grumosol kelabu seluas 13.556 Ha atau 9,78 %, terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, banyak, tarokan, Plemahan, Pare dan Kunjang.
4. Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha atau 10.87%, terdapat di kecamatan Semen, Mojo, Grogol, banyak, tarokan dan kandangan. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung Kelud di sebelah Timur yang bersifat Vulkanik dan Gunung Wilis disebelah barat yang bersifat non vulkanik, sedangkan tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri melintas sungai Brantas yang membelah Wilayah kecamatan Ngaduluwih.

Kecamatan Ngadiluwih memiliki kelurahan sebanyak 16 desa. Daftar nama di kelurahan yang berada di Kecamatan Ngadiluwih, yaitu Tales, Slumbung, Branggahan, Seketi, Bangle, Ngadiluwih, Purwokerto, Dukuh, Rembang Kepuh, Bedug, Rembang, Badal, Badal Pandean, Wonorejo, Banjarrejo dan Mangunrejo. Berbagai sarana dan prasarana fasilitas umumnya perkotaan dapat dijumpai dengan mudah, seperti sekolah, hotel, rumah sakit umum, rumah bersalin, ATM bersama, masjid, dan lain-lain. Pare juga terkenal di seluruh bagian wilayah di Indonesia dengan kampung inggrisnya. Kecamatan Ngadiluwih termasuk kota lama yang dibuktikan dengan

keberadaan dua candi yang terletak tidak jauh dari pusat perkotaan Kecamatan Ngadiluwih, yaitu Candi Surowono dan Candi Tegowangi, dan juga adanya patung “Budo” yang berada tepat di pusat Kecamatan Ngadiluwih. Ketiga penemuan yang ditinggalkan oleh kerajaan membuktikan bahwa Kecamatan Ngadiluwih telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kecamatan Ngadiluwih sudah lama memunculkan industri menengah yang bertaraf internasional, seperti industri *plywood* dan pengembangan bibit-bibit pertanian. Tempat-tempat rekreasi pun juga sudah ada sejak tahun 1970-an meskipun tidak terlalu mewah dan dapat dikatakan masih sangat sederhana pada zamannya, seperti Pemandian “Candra-Bhirawa” Corah dan alun-alun “Ringin-Budo” dan juga sentra ikan hias di Dusun Surowono, Desa Badal.

## 2. Gambaran Aktivitas Penambangan Pasir di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

Mengenai aktivitas penambangan pasir maka terdapat 3 Desa yang memiliki potensi yang tinggi, dimana keriga desa tersebut yaitu meliputi Wonorejo, Badal Pandean dan Seketi. Adapun data-data mengenai aktivitas penambangan pasir pada ketiga desa tersebut dapat disajikan pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Data Penambangan di Desa Wonorejo, Badal Pandean dan Seketi**  
**Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 2015**

No.	Desa	Pemilik	Status
1	Wonorejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Slamet</li> <li>▪ Sahid</li> </ul>	Ilegal Ilegal
2	Badal Pandean	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rudi Bayakan</li> <li>▪ Harnyoto</li> <li>▪ Darman</li> </ul>	Ilegal Ilegal Ilegal
3	Seketi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hanto</li> <li>▪ Harsono</li> </ul>	Ilegal Ilegal

Sumber: Data Survey Peneliti

Data tabel 3.1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan penambang pasir di Desa Wonorejo, Badal Pandean dan Seketi memiliki status ilegal. Kondisi ini dikarenakan pemilik usaha tersebut melanjutkan usaha yang dilakukan keluarganya dan pada sisi yang lain proses kepengurusan yang dirasakan sulit dan mengeluarkan biaya yang besar menjadi penyebab pemilik tidak melakukan atau mengurus surat ijin resmi penambangan pasir. Selama ini pemilik penambangan pasir ilegal rata-rata memiliki pekerja sebanyak 5-10 orang, dimana pekerja tersebut memiliki kemampuan atau pengalaman dalam penambangan pasir<sup>13</sup>. Kondisi ini menjadikan aktivitas penambangan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam proses penambangan tersebut selama ini pemilik masih bersifat ilegal jadi dalam aktivitas administrasinya pemilik belum memiliki kantor, namun demikian aktivitas pencacatan dilakukan secara langsung di lokasi penambangan.

Apabila ditinjau dari peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan maka dapat diketahui bahwa selama ini pemilik rata-rata masih menggunakan tenaga manual dan hanya terdapat 2 pemilik yaitu Rudi Bayakan dan Hanto yang menggunakan tenaga mesin penyedot atau diesel. Penggunaan tenaga kerja manusia tersebut menjadikan aktivitas penambangan yang dilakukan tetap berjalan di masing-masing desa tersebut dikarenakan selama ini keberadaan tambang pasir menyerap tenaga kerja yang dan menjadi sumber penghasilan bagi keluarga dan penambahan dari kas desa. Namun demikian sanksi yang diberikan oleh pengelola atau penambang yang

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara Bapak Joko selaku Kepala Desa Ngadiluwih

memiliki status ilegal belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menjadikan aktivitas tersebut tetap berjalan tanpa adanya proses hukum yang dapat menghilangkan aktivitas tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kemampuan dari pemilik usaha untuk melakukan berbagai pertimbangan sehingga aktivitas tersebut terus berjalan, dalam hal ini terkait dengan penyerapan tenaga kerja dan masukan kas yang diperoleh oleh desa.

### **3. Potensi Pertambangan Pasir dan Batu di aliran sungai di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri**

Kecamatan Ngadiluwih selain memiliki potensi agrobisnis yang terintegrasi dengan agrobisnis kawasan pujon di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan Kecamatan Ngadiluwih, diperlukan sebuah transit dalam mengupayakan distribusi bahan baku yang mudah mengalami kerusakan. Selain itu, karena wilayah di Kecamatan Ngadiluwih memiliki merupakan daerah perbatasan, maka wilayah ini merupakan pangsa pasar terbaik dalam menjangkau kawasan modal yang dekat dengan perbatasan, berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan barang baku. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang dinamis atau dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang selalu berkembang yang telah diuji terapkan yang selanjutnya dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Sehingga sangat jelas apabila pengembangan suatu wilayah harus didasarkan pada beberapa kerangka penerapan yang berkelanjutan dan dinamis sesuai dengan potensi kewilayahan. Tentunya pada suatu wilayah memiliki beragam potensi yang potensial, walaupun tidak kesemuanya dapat dikembangkan secara baik. Kecamatan Ngadiluwih, yang notabene terletak pada kawasan *regency borders*, maka bukan hanya potensi murni saja yang dapat dikembangkan, namun aspek fisik berupa karakteristik kewilayahan seperti letak dan kompleks wilayahnya.

Sejauh ini, pengembangan Kecamatan Ngadiluwih sebagai kawasan ekonomi terpadu, memiliki tinjauan beberapa aspek, termasuk aspek potensi dan sumberdaya kewilayahan, serta bentuk interaksi yang terjadi sebagai konsekuensi karakteristik *regency borders*. Secara fisik, Kecamatan Ngadiluwih memiliki beberapa potensi yang mampu dikembangkan secara baik, termasuk didalamnya potensi fisik, maupun potensi sosial<sup>14</sup>.

Pada dasarnya ada potensi fisik alamiah yang dapat dikembangkan termasuk didalamnya potensi pertambangan pasir dan batu. Hal yang mungkin terlewatkan dalam hal eksploitasi pemerintah daerah didalam mengelola potensi-potensi regionnya terletak pada tidak mendukungnya masyarakat pengelola dengan kebijakan pemerintah daerah. Karena faktanya banyak potensi-potensi fisik yang justru tidak dapat dikembangkan secara maksimal, dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu mengelola bahkan tidak memperdulikan potensi-potensi yang ada.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara Ibu Siti wakil Jasa Tirta Kabupaten Kediri

Potensi pertambangan pasir dan batu di Kecamatan Ngadiluwih, sebagian besar terletak pada aliran sungai berantas. Sungai yang membelah Kecamatan Kandungan menjadi dua bagian besar tersebut, merupakan sungai yang menjadi *one way out* dari aliran lahar dingin Gunung Kelud. Sungai berantas pada dasarnya memanjang melintasi beberapa Kecamatan, seperti Kecamatan Ngadiluwih. Sedangkan di kepung sendiri merupakan kantong lahar, yang mana terdapat banyak sekali material-material pasir dan batu. Sehingga ketika melewati Kecamatan Ngadiluwih, maka terdapat manifestasi dari material tersebut, yang selanjutnya digunakan masyarakat sekitar sebagai bahan bangunan. Namun meskipun aktivitas pertambangan pasir dan batu pada dasarnya merupakan aktivitas yang baik, karena dinilai dapat menjaga aliran sungai dari pendangkalan, hal tersebut dapat juga berarti sebagai hal negatif karena kurangnya pengelolaan dari pemerintah daerah yang berwenang dalam hal pengembangan wilayah. Pada suatu sisi, masyarakat dapat mengelola potensi sumberdaya pertambangan tersebut yang secara langsung dapat mendukung pertumbuhan perekonomian lokal, namun pada suatu sisi pemerintah menilai bahwa aktivitas pertambangan hanya boleh dilakukan pada kawasan tertentu yang mana sudah dicanangkan dalam RTRW Kabupaten, dan aktivitas yang tidak terdapat suatu izin, maka dianggap ilegal.

Justru dengan adanya pertambangan pasir dan batu di Kecamatan Ngadiluwih distribusi material bangunan berupa pasir dan batu pada kawasan *regional boundaries* dapat diatasi. Selain itu, Sungai-sungai dan muara juga terdapat di pulau-pulau besar yang potensial dikelola untuk kehidupan

demikian danau-danau besar di Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan<sup>15</sup>. Salah satu wilayah di Kabupaten Kediri yaitu wilayah Kecamatan Ngadiluwih, dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan atas beberapa analisis diatas bahwa, Kecamatan Kecamatan Ngadiluwih merupakan Kecamatan yang berada pada *regency borders*, yang mana sangat berdekatan dengan kawasan kecamatan yang lainnya, Sehingga aksesibilitas Kecamatan Ngadiluwih menjadi sangat tinggi. Selain itu, Kecamatan Ngadiluwih merupakan Kecamatan yang memiliki potensi pertambangan pasir dan batu (sirtu) yang mana produknya berupa pasir dan batu berbagai ukuran yang sangat dibutuhkan untuk bahan baku material bangunan baik di kawasan Kecamatan Ngadiluwih, maupun kawasan Kabupaten lainnya. Namun didalam RTRW Kecamatan Ngadiluwih, tidak adanya sebuah pengembangan Kecamatan Ngadiluwih menjadi kawasan pertambangan pasir dan batu.

Hal ini sangat bersebarangan apabila ditinjau dari aspek kondisi fisik wilayah Kecamatan Ngadiluwih yang strategis dan berpotensi dalam hal pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi pemerintah daerah untuk dapat mengelola potensi Kecamatan Ngadiluwih serta dapat mengembangkan potensi Kecamatan Ngadiluwih tidak hanya fokus pada suatu hal potensi saja, namun juga melihat potensi-potensi lainnya. Sehingga, dengan adanya pengembangan kawasan Kecamatan Ngadiluwih menjadi daerah dengan konsep agropolitan dan pertambangan, maka akan dapat menunjang pengembangan Kecamatan Ngadiluwih pada umumnya.

---

<sup>15</sup> Worosuprodjo, S., 2007. Analisis Spasial Ekologikal Sumberdaya Lahan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Forum Geografi*, Vol. 21, No.2. Desember 2007. Fakultas Geograf Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta



## **B. Penambangan pasir di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri**

### **1. Kegiatan Pertambangan Pasir di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang menimbulkan dampak kerusakan terhadap fasilitas umum ditinjau dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Dampak dari kegiatan pertambangan pasir di aliran sungai di Kabupaten Kediri memiliki dampak negatif atas keberadaan lingkungan, dimana penambangan pasir tersebut menyebabkan tidak terjadinya keseimbangan kondisi alam sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka terdapat beberapa dampak negatif terkait dengan aktivitas penambangan pasir dialiran sungai di Kabupaten Kediri khususnya di Kecamatan Ngadiluwih, dampak tersebut yaitu meliputi:

#### **1. Terjadinya bahaya longsor atau terjadinya erosi tanah.**

Kegiatan penambangan yang dilakukan di daerah aliran sungai di Kabupaten Kediri dapat mempengaruhi sifat fisika, kimia serta biologi tanah melalui pengupasan tanah lapisan atas, penambangan, pencucian serta pembuangan tailing. Penambangan rakyat yang tidak memperhatikan aspek lingkungan akan menyebabkan terancamnya daerah sekitarnya dengan bahaya erosi dan tanah longsor karena hilangnya vegetasi penutup tanah. Lahan yang digunakan untuk pertambangan tidak seluruhnya digunakan untuk operasi pertambangan secara serentak, tetapi secara bertahap. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Joko selalu Kepala Desa Ngadiluwih yaitu sebagai berikut:

Selama ini penambangan pasir liar tersebut sering mendatangkan berbagai masalah terkait dengan keberadaan lingkungan, dimana terjadinya bahaya longsor dan erosi tanah sering terjadi. Titik-titik terjadinya longsor yaitu terletak pada bantaran sungai yang dilakukan proses pengerukan oleh penambang tersebut (8-12-2016)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Siti selaku Wakil Kepala

Dinas Jasa Titra, yaitu sebagai berikut:

Kalo diwilayah Kabupaten Kediri ini kondisi yang sering terjadi masalah terkait dengan bahaya banjir dan tanah longsor yaitu terjadi diwilayah Kecamatan Ngadiluwih. Hal ini dikarenakan diwilayah tersebut terdapat beberapa aktivitas penambangan baik yang bersifat legal maupun ilegal namun yang status ilegal lebih banyak (12-12-2016)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa lahan yang digunakan untuk pertambangan tidak seluruhnya digunakan untuk operasi pertambangan secara serentak, tetapi secara bertahap. Sebagian besar tanah yang terletak dalam kawasan pertambangan menjadi lahan yang tidak produktif. Sebagian dari lahan yang telah dikerjakan oleh pertambangan tetapi belum direklamasi juga merupakan lahan tidak produktif. Adapun perbandingan kondisi setelah dan sebelum adanya aktivitas penambangan pasir dapat disajikan pada Gambar 3.1.

**Gambar 3.1**  
**Kondisi Sebelum Adanya Penambangan Pasir**



Sumber: Hasil Survey Peneliti

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa sebelum terjadinya aktivitas penambangan pasir menunjukkan bahwa kondisi sungai terstruktur dan menunjukkan bentangan yang sesuai dengan ketentuan atas batas sungai yang ada. Kondisi sungai ini telah sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan dari sungai tersebut sehingga menjadikan sungai memiliki fungsi dengan baik. Adapun kondisi sungai setelah terjadinya aktivitas penambangan pasir dapat ditunjukkan pada gambar 3.2.

**Gambar 3.2**  
**Kondisi Setelah Adanya Penambangan Pasir**



Sumber: Hasil Survey Peneliti

Berdasarkan gambar 3.2 dapat diketahui bahwa posisi garis sungai yang sudah mengalami longsor sehingga mudah terjadinya erosi, kondisi ini menjadikan fungsi sungai tidak dapat secara maksimal. Terkikisnya garis sungai tersebut dikarenakan terjadinya penambangan pasir yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dampak yang ditimbulkan yaitu sungai sebagai salah satu media irigasi tidak dapat digunakan secara maksimal. Berdasarkan perbedaan kondisi sungai tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sungai tidak lagi dapat difungsikan dengan baik setelah terjadinya aktivitas penambangan pasir ilegal. Perbedaan tekstur sungai menjadikan sumber permasalahan bagi masyarakat terutama bagi yang tinggal di pinggiran sungai, bahaya tanah longsor dan banjir sangat mungkin terjadi.

## 2. Terjadinya perubahan yang terjadi pada lingkungan

Lahan bekas kegiatan pertambangan menunggu pelaksanaan reklamasi pada tahap akhir penutupan tambang. Kalau lahan yang telah selesai digunakan secara bertahap direklamasi, maka lahan tersebut dapat menjadi lahan produktif. Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Kondisi ini dapat ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Wakil Kepala Dinas Jasa Tirta Kabupaten Kediri yaitu sebagai berikut:

Menurut saya dampak yang sangat dirasakan dengan adanya penambangan pasir liar yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngadiluwih yaitu adanya perubahan kondisi lingkungan, dimana perubahan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan garis sungai serta kerusakan batas-batas wilayah sungai yang ada. Selain itu perubahan bentang sungai terjadi setelah proses penambangan liar terjadi (12-12-2016)

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Joko Desa Ngadiluwih yang mengatakan bahwa:

Bentuk nyata dari aktivitas penambangan pasir yaitu dengan adanya kerusakan wilayah sungai yang menjadi penyebab awal terjadinya erosi. Kondisi ini banyak terjadi setelah aktivitas penambangan pasir dilakukan (8-12-2016).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terjadinya permasalahan terkait dengan aktivitas penambangan yaitu terjadinya ketidakseimbangan kondisi lingkungan yang menjadikan keseimbangan alam atau kondisi sungai menjadi tidak seimbang.

**Gambar 3.3**  
**Kerusakan Lingkungan**



Sumber: Hasil Survey Peneliti

Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain. Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang terjadi karena kegiatan pertambangan pasir di aliran sungai di Kabupaten Kediri maka berbagai perubahan telah terjadi pada lingkungan yang menyebabkan perubahan ekosistem alam juga mengalami perubahan.



**Gambar 3.4**  
**Gambar Perubahan Bentang Sungai**



Sumber: Hasil Survey Peneliti

Berdasarkan gambar 3.4 menunjukkan adanya perubahan dari bentang sungai yang menunjukkan adanya kerusakan sungai yang menjadikan aliran sungai tidak dapat berfungsi sesuai dengan penggunaan sungai. Adanya perubahan kondisi lingkungan juga terjadi karena adanya perubahan kualitas air, hal ini ditunjukkan dengan terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan-badan air selain itu debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam sistem penambang pasir. Adanya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa potensi rawan akan bencana akan terjadi karena adanya perubahan bentang sungai, kerawanan akan bencana banjir dan tanah longsor akan mudah terjadi sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas penambangan pasir ilegal akan memberikan dampak negatif terjadinya kerusakan lingkungan.

### 3. Terjadinya dampak pada kondisi sosial dan budaya masyarakat

Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak hanya bersumber dari pembuangan limbah, tetapi juga karena perubahan terhadap komponen lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit dikembalikan kepada keadaannya semula. Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Siti selaku Wakil Kepala Dinas Jasa Tirta Kabupaten Kediri yaitu sebagai berikut:

Kalo menurut saya bentuk perubahan tersebut yaitu terjadinya ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan serta melakukan aktivitas-aktivitas yang merugikan keberadaan lingkungan (12-12-2016)



Terjadinya atau dampak pada kondisi sosial dan budaya masyarakat tersebut ditunjukkan dengan adanya perusahaan pola berfikir masyarakat yang tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungan sehingga masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang berpenasi melakukan kerusakan lingkungan. Degradasi lingkungan mungkin saja terjadi pada potensi pertambangan pasir dan batu di kecamatan Ngadiluwih, dimana adanya penambangan tersebut menjadi salah satu bukti adanya perubahan kondisi sosial budaya masyarakat. Hal ini dikarenakan sebuah pemanfaatan, baik dari segi ekstraksi maupun pengolahan pertambangan pada dasarnya akan meninggalkan bekas, berupa residu kerusakan lingkungan. Kerusakan yang mungkin dapat terjadi adalah melebarnya pengikisan serta erosi sungai yang menyebabkan rusaknya kawasan DAS, serta rusaknya fasilitas pendukung berupa jalan serta fasilitas umum lainnya. Sehingga apabila pembangunan kawasan sesuai dengan konsep serta prinsip berkelanjutan, maka degradasi lingkungan tidak akan terjadi.

Pengembangan wilayah dalam merealisasi pembangunan berkelanjutan selain memperhatikan sumber daya internal, tidak luput dari pengaruh lingkungan eksternal, baik yang bersifat regional maupun global<sup>16</sup>. Sebagai dasar pengembangan wilayah yang baik, seharusnya pengembangan wilayah menilik bukan hanya komponen fisik yang mendukung, namun juga memerhatikan perubahan lingkungan eksternal dalam skala global. Oleh karena itu, pengembangan kawasan kecamatan Ngadiluwih menjadi daerah

---

<sup>16</sup> Sumarmi. 2012. *Model-Model Pembelajaran Geografi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing

pertambangan pasir dan batu juga harus melalui beberapa analisis pengembangan wilayah berkelanjutan, dalam rangka menghindari adanya degradasi lingkungan akibat factor-faktor eksternal. Selain itu, untuk proses *recovery* daerah disekitar pertambangan pasir dan batu, khususnya bagian dataran DAS, maka dapat digunakan pendekatan perumusan dan perbaikan kebijakan pengelolaan sumberdaya dalam ekosistem DAS.

Tiga pendekatan untuk dapat melakukan perumusan dan perbaikan kebijakan pengelolaan sumberdaya dalam ekosistem DAS, yaitu dengan pendekatan pengembangan perangkat pemantauan sehingga dapat memberikan peringatan dini terhadap aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, pendekatan pengembangan mekanisme praktis yang mampu menentukan penyebab atau hasil pembangunan yang tidak berkelanjutan, serta pendekatan pengembangan mekanisme adaptasi dan pemilihan kebijakan pengelolaan yang telah memerhatikan aspek ekonomi dan sosial yang relevan dengan permasalahan pada pendekatan kedua<sup>17</sup>. Sehingga fungsi esensial daripada pengembangan kawasan kecamatan Ngadiluwih menjadi kawasan pertambangan pasir dan batu dapat menjadi kawasan dengan konsep pengembangan wilayah yang berkelanjutan, dengan menerapkan beberapa pendekatan di atas untuk menanggulangi dan meminimalisir terjadinya degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut.

---

<sup>17</sup> Asdak, Chay. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai: Edisi Revisi Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yogyakarta

## **2. Peran Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir Yang Tidak Berijin**

Ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini mengenai pengelolaan pertambangan pasir yang tidak memiliki ijin. Tindakan yang dilakukan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu tindakan pencegahan dan tindakan.

Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Siti selaku Wakil Kepala Dinas Jasa Tirta Kabupaten Kediri, yaitu:

Dalam proses melakukan antisipasi terhadap terjadinya dampak negatif terjadinya penambangan maka disini pemerintah daerah memiliki peran untuk mengendalikan dan mengantisipasi terjadi penambangan tersebut sehingga aktivitas penambangan tidak merusak ekosistem lingkungan. Upaya ini dilakukan oleh dinas dengan harapan aktivitas operasional penambangan yang dilakukan tidak melanggar undang-undang (12-12-2016)

Beberapa peran pemerintah daerah terkait dengan upaya pencegahan pengelolaan pertambangan pasir yang tidak berijin dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertama adalah peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri belum melakukan pengelolaan secara sistematis, sehingga proses penambangan terus berlangsung. Pada tingkat desa juga demikian adanya, dimana pemerintah desa belum memiliki kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan penambangan tersebut, hal ini terjadi karena adanya keuntungan yang diperoleh desa dengan keberadaan penambangan

tersebut. Namun demikian setelah terjadinya kasus Lumajang menjadikan aktivitas penambangan agak berkurang baik secara kapasitas maupun aktivitas yang dilakukan penambang.

2. Kedua, pendelegasian wewenang secara bertahap dari Pemerintah (Pusat) kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga.

Semuanya ini merupakan paradigma baru didalam menentukan kebijakan konservasi bahan galian sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya mineral. Secara dikotomis, pengelolaan sumber daya mineral selalu dihadapkan pada dua kepentingan besar, yaitu usaha peningkatan produksi (atau konsumsi) bahan galian dan usaha proteksi (atau pelestarian) lingkungan hidup. Pada satu sisi, pemanfaatan bahan galian adalah langkah positif yang tak terhindarkan untuk mencukupi kebutuhan komoditi mineral yang selalu mendorong upaya eksploitasi bahan galian semaksimal mungkin. Pada sisi lainnya, kegiatan pertambangan dapat dikatakan sebagai penggunaan teknologi yang membawa dampak kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung selesai. Semangat liberalisasi dunia industri mineral mendorong pengusaha terus mengeksplorasi dan mengeksploitasi bahan tambang seraya menolak upaya proteksi lahan.

3. Ketiga, pendayagunaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan

keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang.

Sebaliknya kepentingan lain yang mengatasnamakan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak asasi manusia mendorong kelompok swadaya masyarakat dan pengelola lingkungan hidup terus memperjuangkan kampanye anti pertambangan. Konservasi Bahan Galian (KBG) pada hakekatnya adalah upaya perlindungan, perbaikan dan penggunaan bahan galian secara bijaksana yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, serta menjamin kesinambungan pembangunan bagi masyarakat. Oleh karenanya, KBG diharapkan mampu menjadi titik tengah yang bersifat menjaga keseimbangan (*equalizer*) dan menjadi jembatan kedua kepentingan tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan KBG berdasarkan paradigma, program dan strategi yang tepat, maka diperlukan penyusunan kebijakan KBG dan mensosialisasikannya secara nasional.

Penyusunan regulasi ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan penyediaan peraturan dan kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan sektor pertambangan umum yang berlandaskan hukum dan kaidah konservasi. Berdasarkan kenyataan dan permasalahan di atas, perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan dan perlindungan bahan tambang pasir.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam (termasuk mineral) yang berkelanjutan, kebijakan dan strategi percepatan pembangunan KTI diwujudkan dalam, pertama, upaya upaya eksploitasi sumber daya alam termasuk kelautan dan potensi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dalam batas-batas lestari, dan kedua, upaya penganeekaragaman (*diversifikasi*) ekonomi baik penganeekaragaman horisontal maupun vertikal. Dalam hubungan dengan peningkatan investasi di sektor pertambangan, kebijakan konservasi bahan galian diharapkan dapat mendorong pemanfaatan bahan galian yang memiliki nilai tambah dan potensi pasar yang tinggi, serta industri pertambangan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal.

Kebijakan yang menyangkut proses perijinan sejak penyelidikan umum, eksplorasi sampai tahap eksploitasi atau produksi tambang. Selain itu juga termasuk kebijakan yang menyangkut standarisasi pengelolaan usaha pertambangan yang berasaskan optimalisasi bahan galian, berpihak kepada masyarakat lokal dan berwawasan lingkungan. Peranan pengusaha swasta sangat diperlukan untuk penerapan kebijakan ini terutama untuk pengembangan pertambangan skala besar. Sedangkan pemerintah hanya menjalankan fungsi administratif dan fasilitator, tanpa perlu terjun sebagai pelaku bisnis pertambangan umum.

Kriteria untuk mengelompokkan suatu mineral ikutan didasarkan pada faktor geologi mineral ikutan, konservasi bahan galian (optimalisasi manfaat) dan teknologi atau pengusaha (ekonomi). Mineral

yang memenuhi kriteria mineral ikutan dilaporkan oleh pemegang izin usaha pertambangan kepada pihak pemberi izin usaha pertambangan untuk ditetapkan sebagai mineral ikutan. Mineral utama dan mineral ikutan yang ditemukan atau dihasilkan dari kegiatan eksplorasi atau eksploitasi harus dijelaskan dalam laporan eksplorasi atau eksploitasi oleh pemegang izin usaha pertambangan (Sesuai dengan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Bahan Galian).

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pengelolaan pertambangan pasir yang tidak berijin yaitu dengan melakukan tindakan nyata terkait penanggulangan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan pertambangan pasir yang tidak berijin. Upaya yang dilakukan terkait dengan permasalahan tersebut yaitu dengan menutup aktivitas penambangan tersebut, upaya ini dilakukan untuk memberikan jaminan atas pengelolaan pertambangan yang dilakukan. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menutup aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut. Penutupan tersebut dilakukan untuk menghindarkan tingkat kerusakan yang lebih besar dari kondisi sungai yang terdapat di Kecamatan Ngadiluwih.